

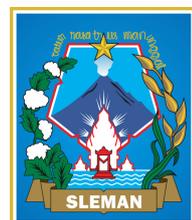
LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN & PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

2022

ppid.slemankab.go.id

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SLEMAN





LAPORAN
KEGIATAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2022

Nomor: 555.3/038

I. PENDAHULUAN

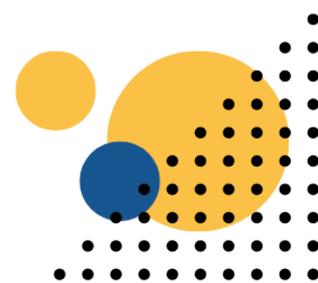
A. Umum

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.

Melalui kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terutama karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan program kerja pemerintah.

Adanya pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 membuat adanya rasionalisasi anggaran di semua sektor, termasuk sosialisasi-sosialisasi. Akan tetapi pelayanan informasi publik tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media penyampaian permohonan informasi publik. Begitu pula dengan koordinasi internal tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat baik berupa rapat koordinasi maupun melalui daring.





B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat capaian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2022.

C. Ruang Lingkup

Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
9. Keputusan Bupati Sleman Nomor 119.1/Kep.KDH/A/2017 tentang Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola





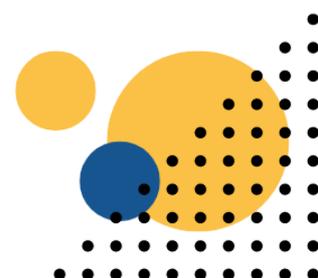
Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman;

11. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 08/Kep.Ka.Dinas/III/2019 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sleman;
12. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan;
13. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 19.3/Kep.Ka.Kominfo/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

II. MATERI LAPORAN

A. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Sosialisasi PPID untuk OPD dan Kalurahan
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di setiap Badan Publik
3. Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah tentang PPID
4. Pelayanan Informasi Publik
5. Pembinaan PPID Kapanewon dan Kalurahan
6. Pengukuhan Tim Pertimbangan, PPID, PPID Pelaksana, dan Sekretariat PPID



- 
7. Forum PPID se-DIY
 8. Mengikuti Monitoring Evaluasi KID DIY Tahun 2022

B. Faktor yang mempengaruhi

1. Anggaran

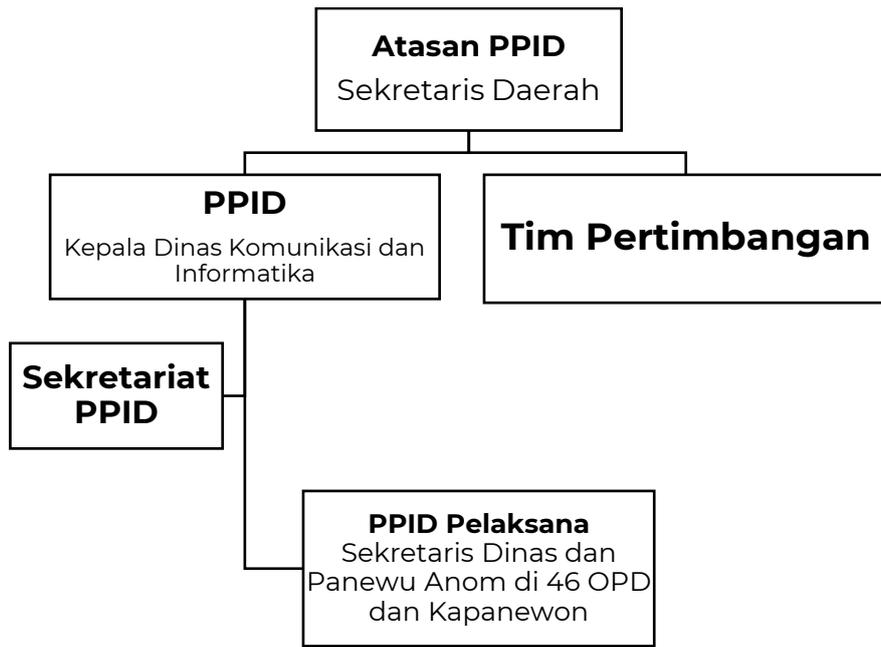
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Informasi Publik dianggarkan sebesar Rp24.750.000,00 pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.

Anggaran pengelolaan layanan informasi publik ini juga tersedia di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, dengan penempatan anggaran pada bidang Kesekretariatan dengan total anggaran sebesar Rp683.233.254,00 .

2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Pemerintah Kabupaten Sleman didukung oleh tim yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 62.3/Kep.KDH/A/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman yang diperbaharui dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman.





3. Sarana dan Prasarana

PPID Kabupaten Sleman menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, meja pelayanan petugas, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



PPID Kabupaten Sleman juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail pelayanan ppid@slemankab.go.id dan aplikasi online e-PPID yang tersedia di website <https://ppid.slemankab.go.id>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online, kemudian permohonan informasi tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas layanan PPID yang ada di tiap OPD.

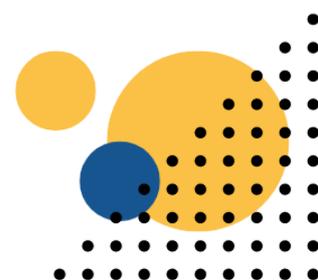
C. Hasil pelaksanaan kegiatan

1. Pertemuan dan Sosialisasi PPID

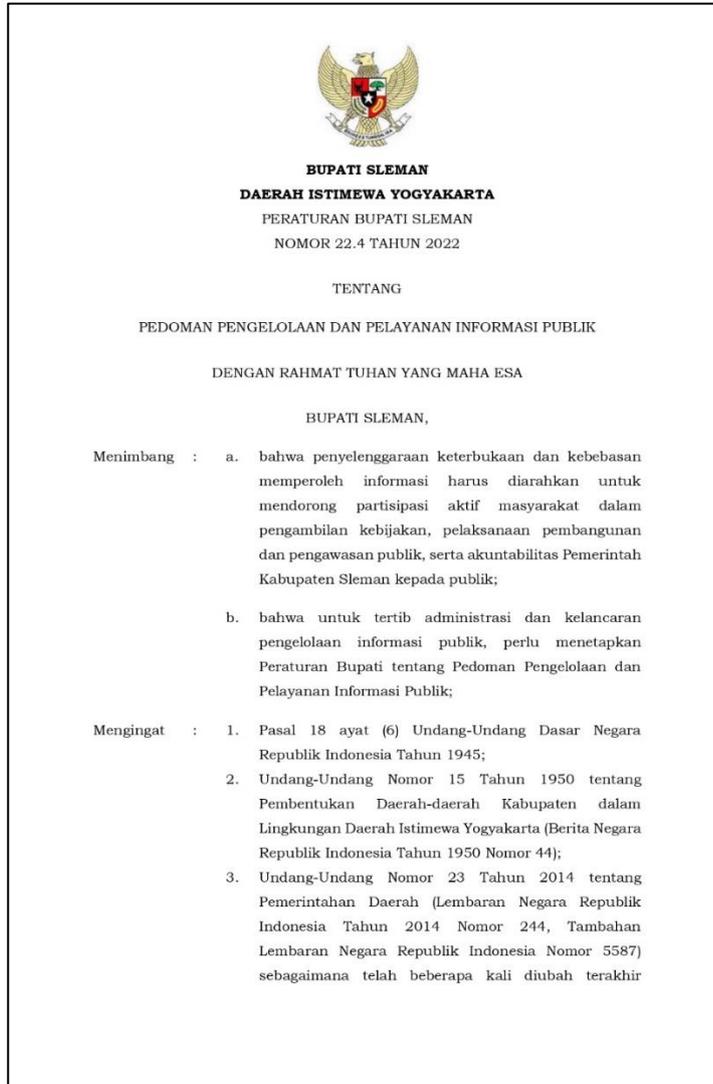
- a. Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan pada 19 Januari 2022 yang dihadiri oleh perwakilan kalurahan dari seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman.
- b. Rapat Kerja Daerah Komisi Informasi Daerah DIY pada 16 Februari 2022 dengan bertindak sebagai narasumber yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku PPID Utama Kabupaten Sleman, Eka Suryo Prihantoro.



- c. Evaluasi Pelayanan Informasi Publik kepada badan publik di Kabupaten Sleman yang dilakukan secara bertahap pada bulan April 2022.
 - d. Workshop Pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Komisi Informasi Daerah (KID) DIY 2022 pada 6 Juni 2022.
 - e. Penyerahan Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2022 kepada badan publik Kabupaten Sleman oleh Bupati Sleman pada 12 Oktober 2022.
 - f. Forum PPID se-DIY pada 8 November 2022 yang dihadiri oleh KID DIY serta PPID Utama DIY dan seluruh kabupaten/kota.
 - g. Pendampingan Pelayanan Informasi, Media Sosial, dan Aduan di Kalurahan Tamanmartani dalam rangka Smart Village pada 1 Desember 2022.
 - h. Pengukuhan Tim Pertimbangan, PPID, PPID Pelaksana, dan Sekretariat PPID Pemerintah Kabupaten Sleman oleh Bupati Sleman pada 9 Desember 2022.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di tiap OPD
 - a. PPID Kabupaten Sleman mengevaluasi penyediaan informasi publik di website perangkat daerah setiap bulan yang hasilnya dilaporkan setiap tiga bulan baik ke pimpinan daerah maupun ke masing-masing OPD (*terlampir*).
 - b. Monitoring dan evaluasi pelayanan permohonan informasi melalui e-PPID, dan kemudian PPID Kabupaten Sleman memberikan laporan mingguan pelayanan informasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (*terlampir*).

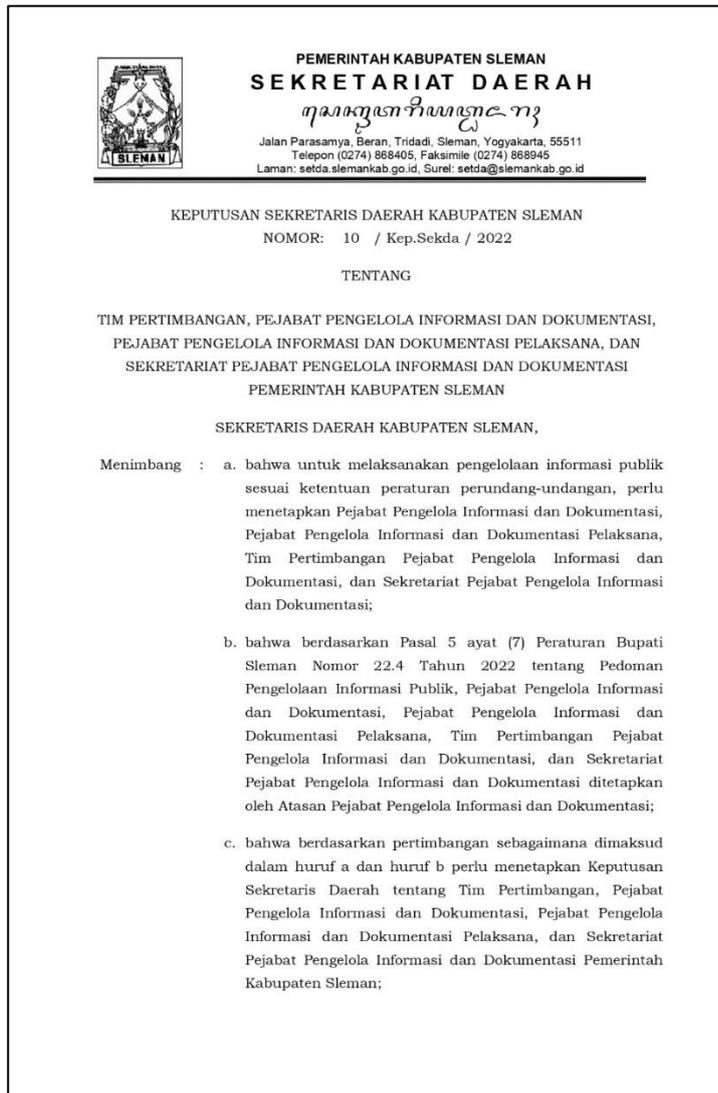


3. Penyusunan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.



4. Penyusunan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman (mengganti Keputusan Bupati Sleman Nomor 62.3/Kep.KDH/A/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman).



5. Pelayanan informasi publik

a. Pelayanan permohonan informasi

Tahun 2022 PPID Pemerintah Kabupaten Sleman menerima 706 permohonan informasi yang tersebar di 46 PPID Pelaksana dan 1 PPID Utama dengan rincian:

- 635 permohonan informasi disetujui
- 27 permohonan informasi ditolak



- 20 permohonan informasi tidak lengkap
- 24 permohonan informasi dalam proses

b. Penyediaan informasi

Tahun 2022, PPID Pemerintah Kabupaten Sleman telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi Pemerintah Kabupaten Sleman di <https://slemankab.go.id/>, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Selain itu juga mendorong website masing-masing OPD untuk menyediakan menu informasi publik.

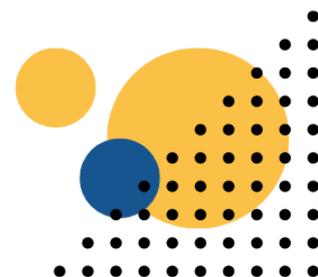
6. Penanganan Sengketa Informasi

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sleman menjalani sengketa informasi sebanyak 1 (satu) perkara dengan putusan KID DIY mengugurkan permohonan sengketa informasi dari pemohon (keputusan terlampir).

7. Pembinaan PPID Kalurahan

PPID Kabupaten Sleman melalui sosialisasi kepada Kalurahan terus melakukan pembinaan kepada Kalurahan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sampai akhir tahun 2022, ada 44 kalurahan dari 86 kalurahan yang sudah membentuk PPID yakni:

- Kalurahan Sendangadi
- Kalurahan Tirtoadi
- Kalurahan Sinduadi
- Kalurahan Sumberadi
- Kalurahan Widodomartani
- Kalurahan Wedomartani
- Kalurahan Condongcatur
- Kalurahan Maguwoharjo





- Kalurahan Tlogoadi
- Kalurahan Sendangmulyo
- Kalurahan Sendangsari
- Kalurahan Sendangarum
- Kalurahan Sumberrahayu
- Kalurahan Sumbersari
- Kalurahan Sumberagung
- Kalurahan Sumberarum
- Kalurahan Pandowoharjo
- Kalurahan Triharjo
- Kalurahan Caturharjo
- Kalurahan Trimulyo
- Kalurahan Tridadi
- Kalurahan Purwomartani
- Kalurahan Tirtomartani
- Kalurahan Tamanmartani
- Kalurahan Sindumartani
- Kalurahan Bimomartani
- Kalurahan Caturtunggal
- Kalurahan Girikerto
- Kalurahan Ambarketawang
- Kalurahan Trihanggo
- Kalurahan Margokaton
- Kalurahan Margodadi
- Kalurahan Margoluwih
- Kalurahan Kepuharjo
- Kalurahan Wukirsari
- Kalurahan Margorejo
- Kalurahan Sumberrejo
- Kalurahan Merdikorejo
- Kalurahan Lumbungrejo
- Kalurahan Sariharjo
- Kalurahan Donoharjo
- Kalurahan Purwobinangun
- Kalurahan Pakembinangun
- Kalurahan Harjobinangun

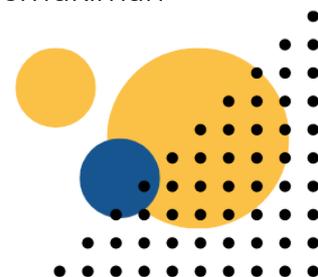
Selain itu, ada 1 kalurahan yang sudah menerbitkan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni Kalurahan Ambarketawang (Kapanewon Gamping).

8. Capaian PPID Tahun 2022

Capaian yang diperoleh PPID Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-DIY yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Badan Publik Kualifikasi “Informatif”

1. Pemerintah Kabupaten Sleman
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman





4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5. Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Inspektorat
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Pemuda dan Olahraga
11. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
12. Dinas P3AP2KB
13. Kapanewon Turi
14. Kapanewon Tempel
15. Kapanewon Mlati
16. Kapanewon Depok
17. Kapanewon Godean
18. Kapanewon Moyudan
19. Kapanewon Seyegan
20. PT BPR Bank Sleman

b. Badan Publik Kualifikasi “Menuju Informatif”

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7. Dinas Perhubungan
8. Kapanewon Gamping
9. Kapanewon Ngaglik

9. Hambatan yang dihadapi

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh organisasi perangkat daerah dan kalurahan;



- 
- b. PPID Pelaksana dan admin PPID yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga informasi yang wajib disediakan di website setiap organisasi perangkat daerah belum tersedia secara lengkap, dan penggunaan e-PPID masih belum optimal pada beberapa organisasi perangkat daerah;
 - c. Pembentukan PPID Kalurahan belum merata/optimal.

III. KESIMPULAN DAN LANGKAH PERBAIKAN

- a. PPID Kabupaten Sleman terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana dan admin e-PPID di organisasi perangkat daerah, agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik dalam waktu 10 hari kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- b. Telah terdapat peningkatan kualitas keterbukaan informasi di Kabupaten Sleman yang dilihat melalui hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh KID DIY Tahun 2022, yaitu 19 badan publik dengan kategori informatif dan 9 badan publik dengan kategori menuju informatif;
- c. Dilakukan penyempurnaan aplikasi layanan e-PPID dan direncanakan pengembangan e-PPID Kalurahan;
- d. Pemutakhiran database daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;
- e. Akan dilaksanakan pembentukan PPID Kalurahan di seluruh kalurahan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023.





IV. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pemerintah Kabupaten Sleman.

Sleman, 10 Januari 2023

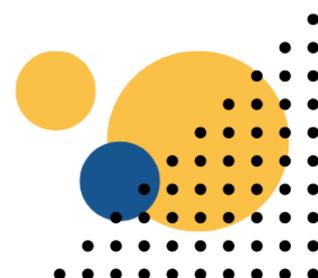
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Sleman



EKA SURYO PRIHANTORO, S.Si, M.Kom

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19680330 199803 1 009





Lampiran Laporan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman

Nomor : 555.3/038

Tanggal : 10 Januari 2023

LAMPIRAN

1. Contoh Monitoring dan Evaluasi Mingguan e-PPID
2. Contoh Monitoring dan Evaluasi Website OPD Triwulan III Tahun 2023
3. Arsip Berita Kegiatan Pembinaan PPID
4. Keputusan Penyelesaian Sengketa Informasi KID DIY

16 Desember 2022



KESBANGPOL :2
BAPPEDA :2
DINAS PERPARI :1
INSPEKTORAT :1
TEMPEL :1



BPBD :2
NGEMPLAK :2
BAPPEDA :1
DINAS LH :1
DINAS PENDIDIKAN :1
DINAS PARIWISATA :1
DINAS PERPUS & ARSIP :1



DINAS PERPUS & ARSIP :4
BAPPEDA :3
DINAS PENDIDIKAN :2
DPTR :1
DINAS KEBUDAYAAN :1
DINAS DUKCAPIL :1
DINAS SOSIAL :1

REKAPITULASI e-PPID

PERMOHONAN INFORMASI BELUM TERSELESAIKAN

 Segera Direspon
(Melebihi 10 Hari)

 Menjadi Perhatian

 Mohon Direspon

LAPORAN MINGGUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI e-PPID
 Jumat, 16 Desember 2022

PPID
 KABUPATEN SLEMAN



No	Tanggal Permohonan	Nomor Register	Nama Pemohon Informasi	OPD Tujuan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Jawaban	Hari Kerja (s.d 16 Desember 2022)
1	06-Apr-22	0198	Hendro Kartiko	KESBANGPOL	Data tingkat pengetahuan politik masyarakat Kabupaten Sleman 5 tahun terakhir	Penyusunan Thesis	diproses	>10
2	13-Jun-22	0316	Afifah Zafirah Siregar	KESBANGPOL	Surat rekomendasi permintaan data ke instansi instansi terkait	Untuk penelitian tugas akhir (UNDIP)	diproses	>10
3	19-Sep-22	0480	Elvi Nur Ramadhani	DINAS PERPARI	Saya membutuhkan data jenis sektor UMKM yg ada di sleman	Untuk mengetahui jumlah sektor UMKM Sleman guna menyelesaikan skripsi	baru	>10
4	21-Nov-22	0620	Lintang Fauziyatu Azmi	BAPPEDA	Data curah hujan, cuaca, suhu dan data yang berkaitan dengan kelembapan tanah, dari tahun 2019-2022 dari BMKG	Untuk Penelitian mengerjakan Skripsi	diproses	>10
5	22-Nov-22	0622	MUTIARA K	INSPEKTORAT	Renstra Kabupaten Sleman	untuk keperluan pengumpulan data dalam praktik mata kuliah manajemen strategi sektor publik fakultas ilmu sosial ilmu politik UNS dan untuk analisis internal dan eksternal mengenai renstra kabupaten sleman yang meliputi isu strategis renstra, kelebihan kekurangan, serta ancaman dan tantangan.	diproses	>10
6	22-Nov-22	0623	Evi Rahmawati	BAPPEDA	Peta-peta Desa Sidorejo, Kecamatan Godean dalam format shapefile meliputi: (1) Peta kemiringan lereng, (2) Peta jenis tanah, (3) Peta jenis batuan/geologi, (4) Peta curah hujan, (5) Peta hidrologi, (6) Peta kegempaan, (7) Peta penutup lahan/penggunaan lahan, (8) Peta/data penggalian dan pemotongan lereng, (9) Peta/data drainase. (10) Peta/data pembangunan konstruksi, (11) Peta kepadatan penduduk. *Apabila peta/data tidak tersedia dalam unit desa, diganti dengan unit kecamatan Godean saja tidak apa-apa. Terima kasih.	Penelitian Skripsi	baru	>10

LAPORAN MINGGUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI e-PPID

Jumat, 16 Desember 2022

PPID
KABUPATEN SLEMAN



No	Tanggal Permohonan	Nomor Register	Nama Pemohon Informasi	OPD Tujuan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Jawaban	Hari Kerja (s.d 16 Desember 2022)
7	02-Des-22	0633	Sahrinda Yuniawati	TEMPEL	Informasi Anggaran Desa Sumberejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.	Informasi ditujukan untuk tugas final project Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Tugas final project ini mengharuskan kami untuk menganalisis potensi Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami memilih Desa Sumberejo. Kami membutuhkan informasi tersebut untuk menganalisis anggaran Desa Sumberejo. Analisis ini ditujukan sebagai data pendukung agar kami mampu membuat rencana anggaran untuk program kerja yang kami inisiasikan.	baru	>10
8	04-Des-22	635	Septianang	BPBD	Ini rekap kekurangan datanya : BPBD Sleman - Peta Kebencanaan Gunung Api - Peta Kebencanaan Lahar Dingin - Peta Kebencanaan Banjir - Peta Kebencanaan Longsor - Peta Kebencanaan Puting Beliung - Peta Kebencanaan Kebakaran	Tugas Penyusunan Fakta & Analisa Kabupaten Sleman	baru	10
9	04-Des-22	636	Septianang	BPBD	Ini rekap kekurangan datanya : BPBD Sleman - Peta Kebencanaan Gunung Api - Peta Kebencanaan Lahar Dingin - Peta Kebencanaan Banjir - Peta Kebencanaan Longsor - Peta Kebencanaan Puting Beliung - Peta Kebencanaan Kebakaran	Tugas Penyusunan Fakta & Analisa Kabupaten Sleman	baru	10
10	05-Des-22	637	Ragil Putri Gendis Aini	BAPPEDA	Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Untuk Memperkuat SGDs	Untuk mendapatkan data dalam menyusun skripsi	diproses	10
11	05-Des-22	0639	Septianang	DINAS LH	File .shp di Geoportal Kab. Sleman yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup, antara lain : - Peta Sebaran RTH - Peta Pengolahan Air Limbah - Peta Jaringan Persampahan	Tugas Penyusunan Fakta dan Analisa	baru	10

LAPORAN MINGGUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI e-PPID

Jumat, 16 Desember 2022

PPID
KABUPATEN SLEMAN



No	Tanggal Permohonan	Nomor Register	Nama Pemohon Informasi	OPD Tujuan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Jawaban	Hari Kerja (s.d 16 Desember 2022)
12	05-Des-22	0641	Septianang	DINAS PENDIDIKAN	Data .shp di Geoportal Kab. Sleman yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, antara lain data lokasi : - Sebaran Fasilitas Pendidikan	Tugas Penyusunan Fakta dan Analisa	diproses	10
13	05-Des-22	0645	Septianang	DINAS PARIWISATA	Data .shp di Geoportal Kab. Sleman yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, antara lain : - SEBARAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020	Tugas Penyusunan Fakta & Analisa	baru	10
14	06-Des-22	0646	Maharsia Asna Dian Putri	DINAS PERPUS & ARSIP	Kearsipan	IMB	baru	9
15	07-Des-22	0647	Windhita Apsari	NGEMPLAK	Data pengguna PAMSIMAS, Informasi mengenai Penggunaan PAMSIMAS	Tugas Akhir Tesis	diproses	8
16	07-Des-22	0648	Windhita Apsari	NGEMPLAK	Data pengguna PAMSIMAS, Informasi mengenai Penggunaan PAMSIMAS	Tugas Akhir Tesis	diproses	8
17	12-Des-22	0653	Ardia Tahta Putri	BAPPEDA	Wawancara tentang pelayanan fasilitas umum di Kabupaten Sleman	Memperoleh Informasi terkait Pertanyaan yang akan saya tanyakan	baru	5
18	12-Des-22	0654	Ardia Tahta Putri	BAPPEDA	Wawancara tentang pelayanan fasilitas umum di Kabupaten Sleman	Memperoleh Informasi terkait Pertanyaan yang akan saya tanyakan	diproses	5
19	12-Des-22	0655	Saverius	DINAS PERPUS & ARSIP	Arsip	IMB	baru	5
20	12-Des-22	0656	Evi Rahmawati	DPTR	Peta-peta Desa Sidorejo, Kecamatan Godean dalam format shapefile meliputi: (1) Peta kemiringan lereng, (2) Peta jenis tanah, (3) Peta jenis batuan/geologi, (4) Peta curah hujan, dan (5) Peta penutup lahan/penggunaan lahan. *Apabila peta/data tersebut tidak tersedia dalam unit desa, diganti dengan unit kecamatan Godean saja tidak apa-apa. Terima kasih	Penelitian Skripsi	baru	5
21	13-Des-22	0658	TRI ADHI DHARMA	BAPPEDA	jumlah kamar hotel yang tersedia, jumlah kamar hotel yang terjual, tingkat hunia kamar hotel, dan rata-rata lama tinggal dari jenis hotel bintang 1 sampai hotel bintang 5 di kabupaten Sleman Yogyakarta.	Memenuhi kebutuhan Skripsi	diproses	4
22	14-Des-22	0659	Afifah Choirunnisa	DINAS KEBUDAYAAN	pengisian koesioner	untuk tugas dari kampus	baru	3
23	14-Des-22	0660	Eka Nurul asih	DINAS DUKCAPIL	Pembuatan akte kelahiran online	Pembuatan akte kelahiran	baru	3
24	14-Des-22	0661	Afifah	DINAS PENDIDIKAN	Kuesioner	Tugas Akhir Kampus	diproses	3

LAPORAN MINGGUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI e-PPID
 Jumat, 16 Desember 2022

PPID
 KABUPATEN SLEMAN



No	Tanggal Permohonan	Nomor Register	Nama Pemohon Informasi	OPD Tujuan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Jawaban	Hari Kerja (s.d 16 Desember 2022)
25	14-Des-22	0662	Benedicta Ayu anjasmoro Aji	DINAS PERPUS & ARSIP	Arip	Magang	baru	3
26	14-Des-22	0663	Benedicta Ayu anjasmoro Aji	DINAS PERPUS & ARSIP	Arip	Magang	baru	3
27	14-Des-22	0664	Handi Rizki Setyo Aji	DINAS PERPUS & ARSIP	Arsip	IMB	baru	3
28	15-Des-22	0667	nasirun	DINAS SOSIAL	Data Kemiskinan Th 2019, 2020, 2021	untuk bahan skripsi	diproses	2
29	15-Des-22	0668	Mila Hita Ayun	DINAS PENDIDIKAN	Surat izin penelitian	Digunakan untuk melakukan penelitian di SD Negeri Se-Kapanewon Ngemplak	baru	2

Keterangan:

Mohon Direspon

Menjadi Perhatian

Segera Direspon (Melebihi 10 hari kerja)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Sleman, 16 Desember 2022

Nomor : 555/004075
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Hal : Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Triwulan III Tahun 2022

Kepada
Yth. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

di Sleman

Pemerintah Kabupaten Sleman selaku Badan Publik Daerah berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama mempunyai ketugasan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Bersama ini kami sampaikan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman periode Triwulan III tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Monitoring dan evaluasi didasarkan pada indikator:

1. Pengelolaan website Perangkat Daerah berkaitan dengan tampilan website dan konten website.
2. Penyediaan informasi publik yang wajib diumumkan baik secara berkala, wajib tersedia setiap saat serta informasi serta merta pada website Perangkat Daerah, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Nomor 08/Kep.Ka.Dinas/III/2019 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi tersebut agar menjadi bahan perbaikan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik pada Perangkat Daerah masing-masing.

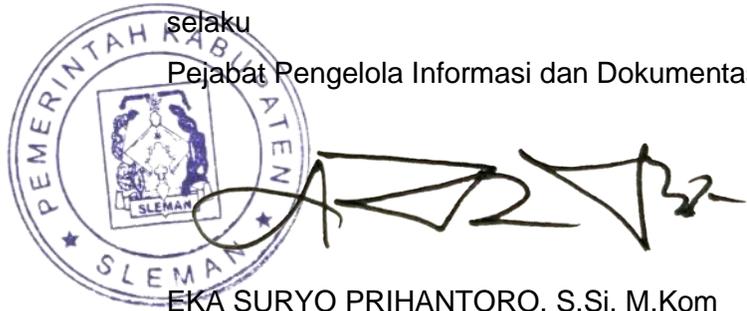
Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Sleman

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

sejaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



EKA SURYO PRIHANTORO, S.Si, M.Kom

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19680330 199803 1 009

Tembusan:

1. Bupati Sleman sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah sebagai bahan rapat koordinasi pimpinan

**A. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN SLEMAN
 UNTUK INDIKATOR PENGELOLAAN WEBSITE/SUBDOMAIN
 BULAN JULI TAHUN 2022**

No	Perangkat Daerah	Alamat Website	Status	Update Posting Terakhir	Jumlah Posting	Tampilan Situs (40%)						Konten Situs (60%)						Total (12+18)	Predikat
						Beranda / Homepage (10%)	Menu (5%)	Tampilan dan Desain (10%)	Inovasi (10%)	Agenda (5%)	Total I (7+8+9+10+11)	Aktualitas (15%)	Foto Kegiatan (5%)	Keterbacaan dan Tata Bahasa (15%)	Kelengkapan Informasi (15%)	Frekuensi (10%)	Total II (13+14+15+16+17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	bkpp.slemankab.go.id	Aktif	22-Jul-22	10	100	90	100	100	100	39,50	80	80	80	90	100	51,50	91,00	Sangat Baik
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.slemankab.go.id	Aktif	19-Jul-22	1	80	80	90	90	50	32,50	40	40	40	40	20	22,00	54,50	Sedang
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bkad.slemankab.go.id	Aktif	25-Jul-22	6	100	100	100	100	100	40,00	80	60	90	100	70	50,50	90,50	Sangat Baik
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.slemankab.go.id	Aktif	30-Jul-22	28	90	100	100	100	100	39,00	80	60	90	100	100	53,50	92,50	Sangat Baik
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.slemankab.go.id	Aktif	15-Jul-22	1	100	90	100	100	100	39,50	80	60	80	80	20	41,00	80,50	Baik
6	Dinas Kebudayaan	kebudayaan.slemankab.go.id	Aktif	28-Jul-22	12	90	80	100	100	100	38,00	80	60	90	100	100	53,50	91,50	Sangat Baik
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dukcapil.slemankab.go.id	Aktif	27-Jul-22	6	90	90	100	100	100	38,50	60	60	90	100	70	47,50	86,00	Sangat Baik
8	Dinas Kesehatan	dinkes.slemankab.go.id	Aktif	26-Jul-22	2	90	80	100	100	90	37,50	100	80	90	100	30	50,50	88,00	Sangat Baik
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	kominfo.slemankab.go.id	Aktif	26-Jul-22	5	100	100	100	100	100	40,00	100	80	100	100	70	56,00	96,00	Sangat Baik
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	dinkopukm.slemankab.go.id	Aktif	27-Jul-22	14	100	90	100	100	100	39,50	100	80	80	100	100	56,00	95,50	Sangat Baik
11	Dinas Lingkungan Hidup	dinh.slemankab.go.id	Aktif	26-Jul-22	7	100	100	100	100	50	37,50	100	80	80	100	90	55,00	92,50	Sangat Baik
12	Dinas Pariwisata	pariwisata.slemankab.go.id	Aktif	06-Jul-22	15	100	90	100	100	50	37,00	0	0	0	0	100	10,00	47,00	Sedang
13	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	dinpupk.slemankab.go.id	Aktif	29-Jul-22	9	100	100	100	100	100	40,00	100	60	90	100	100	56,50	96,50	Sangat Baik
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	dinpmk.slemankab.go.id	Aktif	27-Jul-22	9	100	90	100	100	100	39,50	100	60	80	80	100	52,00	91,50	Sangat Baik
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dinp3ap2kb.slemankab.go.id	Aktif	29-Jul-22	6	100	70	100	100	100	38,50	80	60	80	80	70	46,00	84,50	Baik
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	dispora.slemankab.go.id	Aktif	29-Jul-22	2	100	100	100	100	100	40,00	40	60	70	70	30	33,00	73,00	Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.slemankab.go.id	Aktif	29-Jul-22	35	100	100	100	100	100	40,00	100	60	70	70	100	49,00	89,00	Sangat Baik
18	Dinas Pendidikan	disdik.slemankab.go.id	Aktif	30-Jul-22	15	90	90	100	100	100	38,50	80	60	80	80	100	49,00	87,50	Sangat Baik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Dinas Perhubungan	perhubungan.slemankab.go.id	Aktif	30-Jul-22	26	100	100	100	100	100	40,00	100	60	80	100	100	55,00	95,00	Sangat Baik
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	perindag.slemankab.go.id	Aktif	28-Jul-22	4	100	100	100	100	100	40,00	80	60	80	80	50	44,00	84,00	Baik
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	perpusarsip.slemankab.go.id	Aktif	26-Jul-22	6	100	100	100	100	50	37,50	100	60	80	80	70	49,00	86,50	Sangat Baik
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	pertaru.slemankab.go.id	Aktif	22-Jul-22	3	100	100	100	100	100	40,00	60	60	70	70	40	37,00	77,00	Baik
23	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	pertanian.slemankab.go.id	Aktif	15-Jul-22	1	100	90	100	100	50	37,00	80	60	90	100	20	45,50	82,50	Baik
24	Dinas Sosial	dinsos.slemankab.go.id	Aktif	28-Jul-22	1	100	90	100	100	50	37,00	40	60	80	80	20	35,00	72,00	Baik
25	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.slemankab.go.id	Aktif	27-Jul-22	71	100	90	100	100	100	39,50	40	60	80	80	100	43,00	82,50	Baik
26	Inspektorat Kabupaten	inspektorat.slemankab.go.id	Aktif	31-Jul-22	1	100	90	100	100	100	39,50	80	60	90	100	20	45,50	85,00	Baik
27	Kapanewon Berbah	berbah.slemankab.go.id	Aktif	28-Jul-22	2	100	80	100	100	50	36,50	80	60	70	70	30	39,00	75,50	Baik
28	Kapanewon Cangkringan	cangkringan.slemankab.go.id	Aktif	25-Jul-22	8	80	90	100	100	50	35,00	100	60	70	70	90	48,00	83,00	Baik
29	Kapanewon Depok	depok.slemankab.go.id	Aktif	19-Jul-22	3	100	100	100	100	50	37,50	100	60	80	80	40	46,00	83,50	Baik
30	Kapanewon Gamping	gamping.slemankab.go.id	Aktif	08-Jul-22	1	90	90	100	100	100	38,50	40	40	40	40	20	22,00	60,50	Cukup Baik
31	Kapanewon Godean	godean.slemankab.go.id	Aktif	28-Jul-22	6	100	100	100	100	100	40,00	100	60	70	70	70	46,00	86,00	Sangat Baik
32	Kapanewon Kalasan	kalasan.slemankab.go.id	Aktif	30-Jul-22	24	90	90	100	100	50	36,00	60	60	80	100	100	49,00	85,00	Baik
33	Kapanewon Minggir	minggir.slemankab.go.id	Aktif	-	0	90	100	100	100	100	39,00	0	0	0	0	0	0,00	39,00	Kurang
34	Kapanewon Mlati	mlati.slemankab.go.id	Aktif	31-Jul-22	3	90	100	100	100	100	39,00	100	40	90	90	40	48,00	87,00	Sangat Baik
35	Kapanewon Moyudan	moyudan.slemankab.go.id	Aktif	26-Jul-22	2	100	90	100	100	50	37,00	100	80	80	80	30	46,00	83,00	Baik
36	Kapanewon Ngaglik	ngaglik.slemankab.go.id	Aktif	28-Jul-22	5	100	90	100	100	50	37,00	100	80	40	40	70	38,00	75,00	Baik
37	Kapanewon Ngemplak	ngemplak.slemankab.go.id	Aktif	29-Jul-22	2	100	90	90	100	100	38,50	40	60	70	70	30	33,00	71,50	Baik
38	Kapanewon Pakem	pakem.slemankab.go.id	Aktif	25-Jul-22	2	100	80	90	90	50	34,50	60	60	90	90	30	42,00	76,50	Baik
39	Kapanewon Prambanan	prambanan.slemankab.go.id	Aktif	28-Jul-22	7	100	80	100	100	100	39,00	100	60	70	70	90	48,00	87,00	Sangat Baik
40	Kapanewon Seyegan	seyegan.slemankab.go.id	Aktif	20-Jul-22	1	100	100	100	100	100	40,00	100	60	80	80	20	44,00	84,00	Baik
41	Kapanewon Sleman	kapanebonsleman.slemankab.go.id	Aktif	28-Jul-22	6	90	80	100	100	50	35,50	100	80	80	80	70	50,00	85,50	Sangat Baik
42	Kapanewon Tempel	tempel.slemankab.go.id	Aktif	19-Jul-22	3	90	100	90	100	50	35,50	100	60	70	70	40	43,00	78,50	Baik
43	Kapanewon Turi	turi.slemankab.go.id	Aktif	-	0	100	90	100	100	50	37,00	0	0	0	0	0	0,00	37,00	Kurang
44	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.slemankab.go.id	Aktif	20-Jul-22	5	100	90	100	100	100	39,50	100	80	90	100	70	54,50	94,00	Sangat Baik
45	Sekretariat Daerah	setda.slemankab.go.id	Aktif	-	0	90	100	100	100	50	36,50	0	0	0	0	0	0,00	36,50	Kurang
46	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	dprd.slemankab.go.id	Aktif	08-Jul-22	1	100	90	100	100	50	37,00	100	80	0	0	20	21,00	58,00	Cukup Baik

**A. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
UNTUK INDIKATOR PENGELOLAAN WEBSITE/SUBDOMAIN**

BULAN AGUSTUS TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Alamat Website	Status	Update Posting Terakhir	Jumlah Posting	Tampilan Situs (40%)						Konten Situs (60%)						Total (12+18)	Predikat
						Beranda / Homepage (10%)	Menu (5%)	Tampilan dan Desain (10%)	Inovasi (10%)	Agenda (5%)	Total I (7+8+9+10+11)	Aktualitas (15%)	Foto Kegiatan (5%)	Keterbacaan dan Tata Bahasa (15%)	Kelengkapan Informasi (15%)	Frekuensi (10%)	Total II (13+14+15+16+17)		
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	bkpp.slemankab.go.id	Aktif	30-Agu-22	7	100	100	100	100	100	40,00	80	60	80	90	90	49,50	89,50	Sangat Baik
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.slemankab.go.id	Aktif	-	0	80	80	90	90	50	32,50	0	0	0	0	0	0,00	32,50	Kurang
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bkad.slemankab.go.id	Aktif	23-Agu-22	3	100	100	100	100	100	40,00	100	80	80	100	40	50,00	90,00	Sangat Baik
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.slemankab.go.id	Aktif	19-Agu-22	20	90	100	100	100	100	39,00	60	60	80	100	100	49,00	88,00	Sangat Baik
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.slemankab.go.id	Aktif	25-Agu-22	4	100	100	100	100	100	40,00	100	80	80	90	50	49,50	89,50	Sangat Baik
6	Dinas Kebudayaan	kebudayaan.slemankab.go.id	Aktif	24-Agu-22	14	90	80	100	100	100	38,00	80	60	80	100	100	52,00	90,00	Sangat Baik
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dukcapil.slemankab.go.id	Aktif	25-Agu-22	5	100	90	100	100	100	39,50	60	60	80	100	70	46,00	85,50	Sangat Baik
8	Dinas Kesehatan	dinkes.slemankab.go.id	Aktif	24-Agu-22	10	90	80	100	100	90	37,50	60	60	40	40	100	34,00	71,50	Baik
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	kominfo.slemankab.go.id	Aktif	12-Agu-22	2	100	100	100	100	100	40,00	100	80	100	100	30	52,00	92,00	Sangat Baik
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	dinkopukm.slemankab.go.id	Aktif	29-Agu-22	15	100	90	100	100	100	39,50	100	80	80	100	100	56,00	95,50	Sangat Baik
11	Dinas Lingkungan Hidup	dinh.slemankab.go.id	Aktif	30-Agu-22	5	100	100	100	100	50	37,50	100	80	70	70	70	47,00	84,50	Baik
12	Dinas Pariwisata	pariwisata.slemankab.go.id	Aktif	19-Agu-22	4	100	90	100	100	50	37,00	60	60	80	80	50	41,00	78,00	Baik
13	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	dinpupkp.slemankab.go.id	Aktif	26-Agu-22	5	100	100	100	100	100	40,00	80	60	90	100	70	50,50	90,50	Sangat Baik
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	dinpmk.slemankab.go.id	Aktif	31-Agu-22	9	100	100	100	100	100	40,00	80	60	80	90	100	50,50	90,50	Sangat Baik
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dinp3ap2kb.slemankab.go.id	Aktif	29-Agu-22	7	100	70	100	100	100	38,50	80	60	90	100	90	52,50	91,00	Sangat Baik
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	dispora.slemankab.go.id	Aktif	31-Agu-22	7	100	100	100	100	100	40,00	40	60	80	80	90	42,00	82,00	Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.slemankab.go.id	Aktif	31-Agu-22	36	100	100	100	100	100	40,00	100	60	70	80	100	50,50	90,50	Sangat Baik
18	Dinas Pendidikan	disdik.slemankab.go.id	Aktif	31-Agu-22	12	90	90	100	100	100	38,50	80	80	80	70	100	48,50	87,00	Sangat Baik
19	Dinas Perhubungan	perhubungan.slemankab.go.id	Aktif	31-Agu-22	23	100	100	100	100	100	40,00	100	60	90	100	100	56,50	96,50	Sangat Baik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	perindag.slemankab.go.id	Aktif	31-Agu-22	8	100	100	100	100	100	40,00	80	60	80	80	90	48,00	88,00	Sangat Baik
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	perpusarsip.slemankab.go.id	Aktif	31-Agu-22	8	100	100	100	100	50	37,50	100	60	80	100	90	54,00	91,50	Sangat Baik
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	pertaru.slemankab.go.id	Aktif	25-Agu-22	5	100	100	100	100	100	40,00	100	60	70	70	70	46,00	86,00	Sangat Baik
23	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	pertanian.slemankab.go.id	Aktif	19-Agu-22	1	100	100	100	100	50	37,50	80	60	90	90	20	44,00	81,50	Baik
24	Dinas Sosial	dinsos.slemankab.go.id	Aktif	31-Agu-22	4	100	90	100	100	50	37,00	60	60	80	80	50	41,00	78,00	Baik
25	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.slemankab.go.id	Aktif	29-Agu-22	56	100	90	100	100	100	39,50	60	80	90	100	100	51,50	91,00	Sangat Baik
26	Inspektorat Kabupaten	inspektorat.slemankab.go.id	Aktif	26-Agu-22	2	100	90	100	100	100	39,50	100	60	80	80	30	45,00	84,50	Baik
27	Kapanewon Berbah	berbah.slemankab.go.id	Aktif	30-Agu-22	3	100	80	100	100	100	39,00	40	60	80	90	40	38,50	77,50	Baik
28	Kapanewon Cangkringan	cangkringan.slemankab.go.id	Aktif	25-Agu-22	18	90	90	100	100	50	36,00	100	60	70	70	100	49,00	85,00	Baik
29	Kapanewon Depok	depok.slemankab.go.id	Aktif	19-Agu-22	4	100	100	100	100	100	40,00	60	60	80	90	50	42,50	82,50	Baik
30	Kapanewon Gamping	gamping.slemankab.go.id	Aktif	31-Agu-22	5	90	90	100	100	100	38,50	80	60	70	70	70	43,00	81,50	Baik
31	Kapanewon Godean	godean.slemankab.go.id	Aktif	25-Agu-22	7	100	100	100	100	100	40,00	100	60	80	100	90	54,00	94,00	Sangat Baik
32	Kapanewon Kalasan	kalasan.slemankab.go.id	Aktif	30-Agu-22	32	90	90	100	100	50	36,00	100	60	80	80	100	52,00	88,00	Sangat Baik
33	Kapanewon Minggir	minggir.slemankab.go.id	Aktif	-	0	90	100	100	100	50	36,50	0	0	0	0	0	0,00	36,50	Kurang
34	Kapanewon Mlati	mlati.slemankab.go.id	Aktif	29-Agu-22	7	90	100	100	100	100	39,00	80	60	90	90	90	51,00	90,00	Sangat Baik
35	Kapanewon Moyudan	moyudan.slemankab.go.id	Aktif	17-Agu-22	3	100	90	100	100	50	37,00	100	60	80	80	40	46,00	83,00	Baik
36	Kapanewon Ngaglik	ngaglik.slemankab.go.id	Aktif	22-Agu-22	7	100	90	100	100	50	37,00	100	60	70	70	90	48,00	85,00	Baik
37	Kapanewon Ngemplak	ngemplak.slemankab.go.id	Aktif	31-Agu-22	5	100	90	90	100	100	38,50	80	60	80	80	70	46,00	84,50	Baik
38	Kapanewon Pakem	pakem.slemankab.go.id	Aktif	19-Agu-22	4	100	80	90	90	50	34,50	80	60	90	90	50	47,00	81,50	Baik
39	Kapanewon Prambanan	prambanan.slemankab.go.id	Aktif	20-Agu-22	12	100	80	100	100	100	39,00	100	80	70	70	100	50,00	89,00	Sangat Baik
40	Kapanewon Seyegan	seyegan.slemankab.go.id	Aktif	29-Agu-22	4	100	100	100	100	100	40,00	100	80	70	70	50	45,00	85,00	Baik
41	Kapanewon Sleman	kapanewonseman.slemankab.go.id	Aktif	29-Agu-22	6	90	80	100	100	50	35,50	100	80	80	80	70	50,00	85,50	Sangat Baik
42	Kapanewon Tempel	tempel.slemankab.go.id	Aktif	31-Agu-22	7	90	100	90	100	50	35,50	80	60	70	70	90	45,00	80,50	Baik
43	Kapanewon Turi	turi.slemankab.go.id	Aktif	-	0	100	100	100	100	100	40,00	0	0	0	0	0	0,00	40,00	Kurang
44	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.slemankab.go.id	Aktif	30-Agu-22	6	100	90	100	100	100	39,50	100	80	90	100	70	54,50	94,00	Sangat Baik
45	Sekretariat Daerah	setda.slemankab.go.id	Aktif	-	0	90	100	100	100	50	36,50	0	0	0	0	0	0,00	36,50	Kurang
46	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	dprd.slemankab.go.id	Aktif	30-Agu-22	23	100	90	100	100	50	37,00	100	80	90	100	100	57,50	94,50	Sangat Baik

**A. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
UNTUK INDIKATOR PENGELOLAAN WEBSITE/SUBDOMAIN**

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Alamat Website	Status	Update Posting Terakhir	Jumlah Posting	Tampilan Situs (40%)						Konten Situs (60%)						Total (12+18)	Predikat
						Beranda / Homepage (10%)	Menu (5%)	Tampilan dan Desain (10%)	Inovasi (10%)	Agenda (5%)	Total I (7+8+9+10+11)	Aktualitas (15%)	Foto Kegiatan (5%)	Keterbacaan dan Tata Bahasa (15%)	Kelengkapan Informasi (15%)	Frekuensi (10%)	Total II (13+14+15+16+17)		
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	bkpp.slemankab.go.id	Aktif	30-Sep-22	5	100	100	100	100	100	40,00	100	80	80	80	70	50,00	90,00	Sangat Baik
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.slemankab.go.id	Aktif	-	0	80	80	90	90	50	32,50	0	0	0	0	0	0,00	32,50	Kurang
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bkad.slemankab.go.id	Aktif	30-Sep-22	1	100	100	100	100	100	40,00	100	80	80	100	20	48,00	88,00	Sangat Baik
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.slemankab.go.id	Aktif	30-Sep-22	35	90	100	100	100	100	39,00	60	60	80	90	100	47,50	86,50	Sangat Baik
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.slemankab.go.id	Aktif	29-Sep-22	4	100	100	100	100	100	40,00	100	40	80	100	50	49,00	89,00	Sangat Baik
6	Dinas Kebudayaan	kebudayaan.slemankab.go.id	Aktif	29-Sep-22	15	90	80	100	100	100	38,00	80	60	90	100	100	53,50	91,50	Sangat Baik
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dukcapil.slemankab.go.id	Aktif	09-Sep-22	2	100	100	100	100	100	40,00	60	60	80	100	30	42,00	82,00	Baik
8	Dinas Kesehatan	dinkes.slemankab.go.id	Aktif	19-Sep-22	4	90	80	100	100	90	37,50	100	60	80	100	50	50,00	87,50	Sangat Baik
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	kominfo.slemankab.go.id	Aktif	26-Sep-22	6	100	100	100	100	100	40,00	100	80	100	100	70	56,00	96,00	Sangat Baik
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	dinkopukm.slemankab.go.id	Aktif	30-Sep-22	14	100	90	100	100	100	39,50	100	80	80	80	100	53,00	92,50	Sangat Baik
11	Dinas Lingkungan Hidup	dinh.slemankab.go.id	Aktif	27-Sep-22	3	100	100	100	100	50	37,50	0	0	70	70	40	25,00	62,50	Cukup Baik
12	Dinas Pariwisata	pariwisata.slemankab.go.id	Aktif	23-Sep-22	5	100	90	100	100	50	37,00	80	60	90	100	70	50,50	87,50	Sangat Baik
13	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	dinpupkp.slemankab.go.id	Aktif	29-Sep-22	6	100	100	100	100	100	40,00	100	60	90	100	70	53,50	93,50	Sangat Baik
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	dinpmk.slemankab.go.id	Aktif	26-Sep-22	15	100	100	100	100	100	40,00	80	60	80	80	100	49,00	89,00	Sangat Baik
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dinp3ap2kb.slemankab.go.id	Aktif	30-Sep-22	8	100	70	100	100	100	38,50	80	60	80	80	90	48,00	86,50	Sangat Baik
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	dispora.slemankab.go.id	Aktif	17-Sep-22	2	100	100	100	100	100	40,00	100	40	70	80	30	42,50	82,50	Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.slemankab.go.id	Aktif	30-Sep-22	24	100	100	100	100	100	40,00	100	60	70	70	100	49,00	89,00	Sangat Baik
18	Dinas Pendidikan	disdik.slemankab.go.id	Aktif	29-Sep-22	9	90	90	100	100	100	38,50	80	80	80	80	100	50,00	88,50	Sangat Baik
19	Dinas Perhubungan	perhubungan.slemankab.go.id	Aktif	30-Sep-22	23	100	100	100	100	100	40,00	100	60	90	100	100	56,50	96,50	Sangat Baik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	perindag.slemankab.go.id	Aktif	19-Sep-22	2	100	100	100	100	100	40,00	80	60	80	80	30	42,00	82,00	Baik
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	perpusarsip.slemankab.go.id	Aktif	29-Sep-22	9	100	100	100	100	50	37,50	100	60	80	80	100	52,00	89,50	Sangat Baik
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	pertaru.slemankab.go.id	Aktif	30-Sep-22	4	100	100	100	100	100	40,00	100	60	80	100	50	50,00	90,00	Sangat Baik
23	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	pertanian.slemankab.go.id	Aktif	28-Sep-22	7	100	100	100	100	50	37,50	80	60	90	80	90	49,50	87,00	Sangat Baik
24	Dinas Sosial	dinsos.slemankab.go.id	Aktif	27-Sep-22	12	100	90	100	100	50	37,00	60	60	80	80	100	46,00	83,00	Baik
25	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.slemankab.go.id	Aktif	28-Sep-22	30	100	90	100	100	100	39,50	60	60	100	100	100	52,00	91,50	Sangat Baik
26	Inspektorat Kabupaten	inspektorat.slemankab.go.id	Aktif	30-Sep-22	3	100	90	100	100	100	39,50	100	60	80	80	40	46,00	85,50	Sangat Baik
27	Kapanewon Berbah	berbah.slemankab.go.id	Aktif	28-Sep-22	4	100	80	100	100	50	36,50	80	60	80	90	50	45,50	82,00	Baik
28	Kapanewon Cangkringan	cangkringan.slemankab.go.id	Aktif	26-Sep-22	12	90	90	100	100	50	36,00	80	60	70	70	100	46,00	82,00	Baik
29	Kapanewon Depok	depok.slemankab.go.id	Aktif	30-Sep-22	2	100	100	100	100	100	40,00	60	60	80	80	30	39,00	79,00	Baik
30	Kapanewon Gamping	gamping.slemankab.go.id	Aktif	29-Sep-22	11	100	90	100	100	100	39,50	100	60	70	70	100	49,00	88,50	Sangat Baik
31	Kapanewon Godean	godean.slemankab.go.id	Aktif	29-Sep-22	5	100	100	100	100	100	40,00	100	60	80	100	70	52,00	92,00	Sangat Baik
32	Kapanewon Kalasan	kalasan.slemankab.go.id	Aktif	30-Sep-22	12	90	90	100	100	50	36,00	100	60	80	90	100	53,50	89,50	Sangat Baik
33	Kapanewon Minggir	minggir.slemankab.go.id	Aktif	-	0	90	100	100	100	50	36,50	0	0	0	0	0	0,00	36,50	Kurang
34	Kapanewon Mlati	mlati.slemankab.go.id	Aktif	25-Sep-22	2	90	100	100	100	100	39,00	100	60	90	90	30	48,00	87,00	Sangat Baik
35	Kapanewon Moyudan	moyudan.slemankab.go.id	Aktif	27-Sep-22	3	100	90	100	100	50	37,00	40	40	40	40	40	24,00	61,00	Cukup Baik
36	Kapanewon Ngaglik	ngaglik.slemankab.go.id	Aktif	28-Sep-22	5	100	90	100	100	50	37,00	100	60	80	80	70	49,00	86,00	Sangat Baik
37	Kapanewon Ngemplak	ngemplak.slemankab.go.id	Aktif	22-Sep-22	4	100	100	90	100	100	39,00	80	60	80	80	50	44,00	83,00	Baik
38	Kapanewon Pakem	pakem.slemankab.go.id	Aktif	07-Sep-22	3	100	80	90	90	50	34,50	60	60	90	90	40	43,00	77,50	Baik
39	Kapanewon Prambanan	prambanan.slemankab.go.id	Aktif	30-Sep-22	9	100	80	100	100	100	39,00	100	60	70	70	100	49,00	88,00	Sangat Baik
40	Kapanewon Seyegan	seyegan.slemankab.go.id	Aktif	12-Sep-22	1	100	100	100	100	100	40,00	60	60	70	70	20	35,00	75,00	Baik
41	Kapanewon Sleman	kapanewonseman.slemankab.go.id	Aktif	28-Sep-22	3	90	80	100	100	50	35,50	100	60	80	80	40	46,00	81,50	Baik
42	Kapanewon Tempel	tempel.slemankab.go.id	Aktif	28-Sep-22	4	90	100	90	100	50	35,50	80	60	80	80	50	44,00	79,50	Baik
43	Kapanewon Turi	turi.slemankab.go.id	Aktif	-	0	100	100	100	100	50	37,50	0	0	0	0	0	0,00	37,50	Kurang
44	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.slemankab.go.id	Aktif	19-Sep-22	5	100	90	100	100	100	39,50	100	80	90	100	70	54,50	94,00	Sangat Baik
45	Sekretariat Daerah	setda.slemankab.go.id	Aktif	-	0	90	100	100	100	50	36,50	0	0	0	0	0	0,00	36,50	Kurang
46	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	dprd.slemankab.go.id	Aktif	30-Sep-22	25	100	90	100	100	50	37,00	100	80	90	100	100	57,50	94,50	Sangat Baik

**B. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
UNTUK INDIKATOR INFORMASI PUBLIK**

TRIWULAN III TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Alamat Website	Status	Informasi Publik (100%)					Total (5+6+7+8 +9)	Predikat
				Informasi Berkala (20%)	Informasi Setiap Saat (20%)	Informasi Serta Merta (20%)	Formulir atau link e-PPID (20%)	Respon permohonan e-PPID (20%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	bkpp.slemankab.go.id	Aktif	19,60	20,00	20,00	20,00	20,00	99,60	Sangat Baik
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.slemankab.go.id	Aktif	12,40	13,14	20,00	15,00	10,00	70,54	Baik
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bkad.slemankab.go.id	Aktif	20,00	17,43	16,00	20,00	20,00	93,43	Sangat Baik
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.slemankab.go.id	Aktif	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	Sangat Baik
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.slemankab.go.id	Aktif	18,40	17,71	14,67	20,00	20,00	90,78	Sangat Baik
6	Dinas Kebudayaan	kebudayaan.slemankab.go.id	Aktif	17,00	19,43	20,00	20,00	20,00	96,43	Sangat Baik
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dukcapil.slemankab.go.id	Aktif	13,85	18,57	4,00	20,00	20,00	76,42	Baik
8	Dinas Kesehatan	dinkes.slemankab.go.id	Aktif	10,00	14,57	9,33	10,00	20,00	63,90	Cukup Baik
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	kominfo.slemankab.go.id	Aktif	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	Sangat Baik
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	dinkopukm.slemankab.go.id	Aktif	17,60	18,57	20,00	20,00	20,00	96,17	Sangat Baik
11	Dinas Lingkungan Hidup	dinlh.slemankab.go.id	Aktif	19,60	19,71	20,00	20,00	20,00	99,31	Sangat Baik
12	Dinas Pariwisata	pariwisata.slemankab.go.id	Aktif	17,20	16,00	14,67	10,00	20,00	77,87	Baik
13	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	dinpupkp.slemankab.go.id	Aktif	19,60	17,43	20,00	20,00	20,00	97,03	Sangat Baik
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	dinpmk.slemankab.go.id	Aktif	18,00	19,71	20,00	20,00	20,00	97,71	Sangat Baik
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dinp3ap2kb.slemankab.go.id	Aktif	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	Sangat Baik
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	dispورا.slemankab.go.id	Aktif	20,00	19,43	14,67	20,00	20,00	94,10	Sangat Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.slemankab.go.id	Aktif	19,80	17,43	20,00	20,00	20,00	97,23	Sangat Baik
18	Dinas Pendidikan	disdik.slemankab.go.id	Aktif	18,60	19,71	20,00	20,00	20,00	98,31	Sangat Baik
19	Dinas Perhubungan	perhubungan.slemankab.go.id	Aktif	17,00	19,43	19,33	20,00	20,00	95,76	Sangat Baik
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	perindag.slemankab.go.id	Aktif	18,60	19,14	20,00	20,00	15,00	92,74	Sangat Baik
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	perpusarsip.slemankab.go.id	Aktif	18,40	19,14	14,67	20,00	20,00	92,21	Sangat Baik
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	pertaru.slemankab.go.id	Aktif	20,00	20,00	19,33	20,00	20,00	99,33	Sangat Baik
23	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	pertanian.slemankab.go.id	Aktif	13,20	14,57	9,33	10,00	10,00	57,10	Cukup Baik
24	Dinas Sosial	dinsos.slemankab.go.id	Aktif	18,80	17,43	20,00	20,00	20,00	96,23	Sangat Baik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.slemankab.go.id	Aktif	12,00	18,57	4,00	15,00	10,00	59,57	Cukup Baik
26	Inspektorat Kabupaten	inspektorat.slemankab.go.id	Aktif	19,40	19,43	14,67	20,00	15,00	88,50	Sangat Baik
27	Kapanewon Berbah	berbah.slemankab.go.id	Aktif	9,80	14,00	4,00	20,00	20,00	67,80	Cukup Baik
28	Kapanewon Cangkringan	cangkringan.slemankab.go.id	Aktif	16,20	17,43	19,33	10,00	20,00	82,96	Baik
29	Kapanewon Depok	depok.slemankab.go.id	Aktif	19,60	20,00	20,00	20,00	20,00	99,60	Sangat Baik
30	Kapanewon Gamping	gamping.slemankab.go.id	Aktif	19,80	20,00	14,67	15,00	20,00	89,47	Sangat Baik
31	Kapanewon Godean	godean.slemankab.go.id	Aktif	17,80	20,00	20,00	20,00	20,00	97,80	Sangat Baik
32	Kapanewon Kalasan	kalasan.slemankab.go.id	Aktif	13,00	15,71	14,67	10,00	20,00	73,38	Baik
33	Kapanewon Minggir	minggir.slemankab.go.id	Aktif	16,80	17,71	14,67	20,00	20,00	89,18	Sangat Baik
34	Kapanewon Mlati	mlati.slemankab.go.id	Aktif	20,00	19,71	18,67	15,00	20,00	93,38	Sangat Baik
35	Kapanewon Moyudan	moyudan.slemankab.go.id	Aktif	17,40	17,14	20,00	20,00	20,00	94,54	Sangat Baik
36	Kapanewon Ngaglik	ngaglik.slemankab.go.id	Aktif	19,60	17,43	20,00	20,00	20,00	97,03	Sangat Baik
37	Kapanewon Ngeplak	ngemplak.slemankab.go.id	Aktif	19,60	19,43	20,00	20,00	20,00	99,03	Sangat Baik
38	Kapanewon Pakem	pakem.slemankab.go.id	Aktif	11,60	14,00	12,00	20,00	20,00	77,60	Baik
39	Kapanewon Prambanan	prambanan.slemankab.go.id	Aktif	12,80	17,71	-	20,00	20,00	70,51	Baik
40	Kapanewon Seyegan	seyegan.slemankab.go.id	Aktif	19,60	20,00	14,67	20,00	20,00	94,27	Sangat Baik
41	Kapanewon Sleman	kapanebonsleman.slemankab.go.id	Aktif	12,00	16,00	14,67	15,00	15,00	72,67	Baik
42	Kapanewon Tempel	tempel.slemankab.go.id	Aktif	19,60	17,71	14,67	20,00	20,00	91,98	Sangat Baik
43	Kapanewon Turi	turi.slemankab.go.id	Aktif	18,80	17,14	14,67	20,00	20,00	90,61	Sangat Baik
44	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.slemankab.go.id	Aktif	19,00	18,86	20,00	20,00	20,00	97,86	Sangat Baik
45	Sekretariat Daerah	setda.slemankab.go.id	Aktif	19,80	12,57	10,67	20,00	20,00	83,04	Baik
46	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	dprd.slemankab.go.id	Aktif	11,00	11,43	14,67	20,00	20,00	77,10	Baik

a.n. Bupati Sleman

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



EKA SURYO PRIHANTORO, S.Si, M.Kom

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19680330 199803 1 009



SLEMAN FOKUS BERIKAN PELAYANAN INFORMASI BERKUALITAS UNTUK PUBLIK

Posted by admin | Feb 17, 2022 | Berita, Bidang IKP | 0 | ★★★★★



Sleman – Salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melayani masyarakat adalah penyediaan pelayanan informasi yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, Pemkab Sleman menerapkan beberapa strategi demi memastikan pelayanan informasi yang diberikan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilakukan secara maksimal.

“Ada beberapa langkah yang diambil untuk memastikan pelayanan informasi dapat berjalan maksimal,” ujar Eka Suryo Prihantoro, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman dalam acara Rapat Kerja

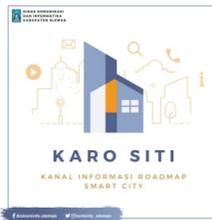
ATF 2023



English Indonesian

SEARCH ...

KANAL INFORMASI SMART CITY



SLEMAN TV – SLEMAN SMART REGENCY



Daerah Komisi Informasi Daerah DIY di Ruang Kresna Kominfo DIY Jl. Brigjen Katamso, Komplek THR Yogyakarta, Rabu (16/2/2022).

Dalam pemaparannya, Eka mengatakan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah dengan memastikan adanya payung hukum yang melandasi pelayanan informasi yang diberikan. Dalam hal ini, Kabupaten Sleman telah memiliki beberapa produk hukum yang menjadi acuan untuk memastikan pelayanan informasi berkualitas dapat tersedia. Semua pelayanan informasi yang diberikan di Pemkab Sleman mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, ada juga Peraturan dan Keputusan Bupati Sleman, maupun Keputusan Kepala Diskominfo Sleman.

Langkah lain yang dilakukan adalah memastikan aktivitas pelayanan informasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan hal tersebut, Pemkab Sleman telah menyediakan anggaran khusus untuk para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik yang utama maupun pembantu dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

“Khusus untuk PPID Kalurahan, anggaran diusulkan dalam APBD di masing-masing kalurahan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK),” ungkap Eka.

Strategi berikutnya adalah menjadikan informasi publik sebagai salah satu indikator kinerja perangkat daerah. Hal ini tercantum dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 32.5/Kep.KDH/A/2021 tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Dalam keputusan tersebut, salah satu indikator penilaian kinerja OPD adalah pengelolaan Informasi yang terdiri dari pengelolaan website, dan juga pengelolaan informasi publik.

“Untuk memastikan pengelolaan informasi dapat berjalan maksimal, kemudian dilakukan Monitoring dan Evaluasi, dengan laporan mingguan untuk PPID, dan evaluasi website seluruh OPD setiap bulan yang disampaikan setiap triwulan,” ujar Eka. Hasil money tersebut nantinya akan disampaikan dalam rapat koordinasi pimpinan sebagai bentuk *reward* dan *punishment* bagi para OPD yang telah memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Pemkab Sleman sendiri saat ini juga telah mengembangkan aplikasi pelayanan informasi publik secara elektronik yaitu e-PPID. Hal ini dilakukan agar pelayanan informasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. “Masyarakat dapat lebih mudah untuk memperoleh informasi dengan e-PPID, baik melalui akses website maupun dari sistem aplikasi android,” terang Eka lagi.

Eka menambahkan bahwa pengembangan aplikasi e-PPID ini dilakukan juga demi memastikan seluruh data permohonan informasi dapat tersimpan dengan aman di database. Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar untuk merumuskan program dan mengambil suatu kebijakan.

SLEMAN SMARTAPP



LINK



INSTAGRAM KAMI

Dinas Komunikasi dan Informatika Sleman
#kominfosleman
#laporsleman



SAMBUT MONEV KIP, DISKOMINFO SLEMAN BEKALI BADAN PUBLIK MENGENAI CARA PENGISIAN SAQ

Posted by admin | Jun 7, 2022 | Berita, Bidang IKP | 0 | ★★★★★



Sleman – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman mengadakan Workshop Pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Komisi Informasi Daerah (KID) DIY 2022 pada Senin (06/6/2022) di Aula Pangripta Bappeda Kab. Sleman. Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Sleman, Eka Suryo Prihantoro.

Eka menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu faktor pendorong transparansi kinerja pemerintah. Karena dengan adanya aksesibilitas informasi dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.

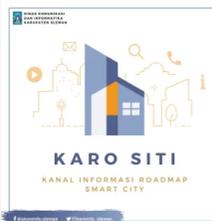
ATF 2023



English Indonesian

SEARCH ...

KANAL INFORMASI SMART CITY



SLEMAN TV - SLEMAN SMART REGENCY

Tentukan Progr...



“Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sleman serta seluruh badan publik yang berada di lingkup Kabupaten Sleman telah melakukan registrasi untuk mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di tahun 2022 ini. Terdapat 46 perangkat daerah dan 1 BUMD yang telah melakukan registrasi dan kini akan menjalani tahap pengisian SAQ atau Self Assesment Questionnaire,” ujar Eka.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Noor Hidayati ZP menjelaskan bahwa terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memasuki tahap pengisian SAQ. Pertama diperlukan registrasi terlebih dahulu kemudian melakukan verifikasi dan aktivasi akun oleh yang bersangkutan. Kemudian baru dilakukan langkah-langkah selanjutnya seperti penilaian, uji akses, visitasi, dan yang terakhir penganugerahan.

Pada Monev tahun 2021 sendiri, keterbukaan informasi di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, terdapat 19 PPID dengan kategori terbaik yaitu “informatif”, sedangkan pada tahun 2020 hanyalah 6 PPID yang mendapat kategori tersebut.

Oleh karena itu, Noor mengingatkan agar setiap OPD dapat memperhatikan setiap tahapan Monev yang sedang berlangsung, termasuk pengisian SAQ. “Kita tinggal mengisi SAQ dengan percaya diri, karena ini merupakan bagian pertama yang akan menentukan lanjut atau tidaknya,” ujar Noor.

Hal tersebut ditekankan mengingat beberapa kendala yang dialami OPD pada masa pengisian SAQ pada Monev tahun 2021. Beberapa kendala tersebut dapat berupa terlambat mengisi SAQ, tidak cermat saat mengisi, pengelolaan PPID yang kurang terpantau, kesulitan melengkapi dokumen, dan beberapa hal penghambat lainnya.

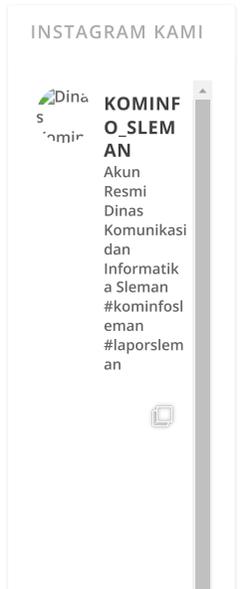
Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Agastya Dedy Kusuma kemudian memaparkan mengenai teknis pengisian SAQ. Agastya mengharapkan agar semua dapat melakukan langkah-langkah pengisian dengan benar sehingga dapat mendapatkan hasil yang diinginkan.

“Prinsipnya untuk SAQ semakin banyak yang diisi dengan benar semakin tinggi nilainya. Jadi usahakan semua tanpa terkecuali bisa diisi, baik link maupun dokumen pendukung yang di-upload di-website-nya,” ungkap Agastya. (Rep Ivan)

SHARE: RATE:

< PREVIOUS

NEXT >





18 BADAN PUBLIK SLEMAN RAIH PREDIKAT INFORMATIF

Posted by admin | Oct 12, 2022 | Berita, Bidang IKP | 0 | ★★★★★



Sleman – Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo didampingi Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, menyerahkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2022 kepada Badan Publik di Kabupaten Sleman. Penyerahan dilakukan di Ruang Rapat Lantai 3 Sekretariat Daerah Sleman, Rabu (12/10/2022).

ATF 2023



English Indonesian

SEARCH ...

KANAL INFORMASI SMART CITY



SLEMAN TV - SLEMAN SMART REGENCY

Tentukan Progr...



Noor Hidayati Zakiyah Pramulani selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa Penghargaan Keterbukaan Informasi ini dilakukan untuk mengapresiasi Badan Publik di Kabupaten Sleman yang dapat mencapai predikat informatif.

“Penyerahan penghargaan dari Komisi Informasi Daerah ini dilakukan untuk mengapresiasi badan publik kita yang informatif. Kita serahkan penghargaannya di forum yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan OPD yang harapannya nanti akan memotivasi OPD yang lain yang belum mendapatkan penghargaan. Sehingga nantinya, OPD lain dalam pengelolaan informasinya akan lebih baik,” ungkap wanita yang biasa disapa Ida ini.

Ida juga memberikan keterangan bahwa setiap tahun, Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) untuk melihat bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik itu di masing-masing badan publik.

“Di tahun ini, badan publik di Kabupaten Sleman yang informatif baru 18 badan publik, yang menuju informatif ada 9 badan publik, cukup informatif ada 9 badan publik, kurang informatif itu 6 badan publik, dan yang tidak informatif ada 7 badan publik,” tambah Ida.

Pada acara penyerahan penghargaan ini, 18 badan publik dengan predikat informatif tersebut tersebar pada empat kategori. Diawali dengan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY untuk Kabupaten Sleman, yang diberikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sleman, Eka Suryo Prihantoro.

Lalu dilanjutkan dengan penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY untuk Kabupaten Sleman, yang diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Kabupaten Sleman, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga.

Selanjutnya terdapat penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Kapanewon/Kemantren se-DIY, yang diberikan kepada Kapanewon Turi, Kapanewon Tempel, Kapanewon Mlati, Kapanewon Depok, Kapanewon Godean, Kapanewon Moyudan, dan Kapanewon Seyegan.

Pemberian penghargaan diakhiri dengan penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Badan Usaha Milik Daerah se-DIY, yang diberikan kepada PT. BPR Bank Sleman Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroada). (Rep Nesy)

00:00 02:57

SLEMAN SMARTAPP



LINK



INSTAGRAM KAMI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman
KOMINFO_SLEMAN
Akun Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Sleman
#kominfo Sleman
#laporsleman





KUATKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, PEJABAT PPID SE-KABUPATEN SLEMAN DIKUKUHKAN

Posted by admin | Dec 9, 2022 | Berita, Bidang IKP | 0 | ★★★★★



Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melaksanakan Pengukuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi se-Kabupaten Sleman bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Sekretariat Daerah Sleman, Jumat (9/12/2022). Pengukuhan dilakukan langsung oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo.

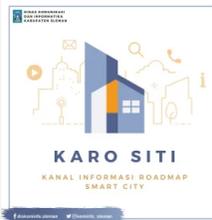
ATF 2023



English Indonesian

SEARCH ...

KANAL INFORMASI SMART CITY



SLEMAN TV - SLEMAN SMART REGENCY

Tentukan Progr..

Kepala Diskominfo Sleman menuturkan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kebijakan Pemkab Sleman untuk melaksanakan transparansi dan keterbukaan informasi serta sistem pemerintahan yang responsif dan cepat.

“Tujuannya adalah untuk penguatan ketugasan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman,” tutur Eka.

Ia menambahkan bahwa pengukuhan ini dilakukan mengacu pada terbitnya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 yang kemudian diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik yang kemudian mengatur tentang perubahan regulasi serta struktur.

“Terkait dengan perubahan struktur, telah diterbitkan pula Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman,” ujar Eka.

Sementara itu, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa pengukuhan ini merupakan komitmen Pemkab Sleman untuk menjamin keterbukaan informasi bagi masyarakat Sleman.

“Keterbukaan informasi menjadi hak masyarakat Sleman, dan telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Agar masyarakat dapat menjadi agen kontrol terhadap pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di segala macam lini,” ungkap Kustini.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar seluruh pejabat PPID yang baru dikukuhkan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku. “Sehingga pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Ia berharap setiap pejabat dapat menjalankan amanah peraturan KID Indonesia dalam menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Sleman.

“Jabatan ini merupakan suatu amanah. Untuk itu saya berharap setiap pejabat bisa melaksanakan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” seru Kustini.

Ia juga meminta para pejabat PPID dapat meningkatkan kapasitas, serta terus berkoordinasi dan bersikap proaktif untuk meng-update berbagai informasi terkini.



00:00 02:57

SLEMAN SMARTAPP



LINK



INSTAGRAM KAMI



SALINAN



PUTUSAN

NOMOR: 005/V/KIDDIY-PS-A-M/2022

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **005/V/KIDDIY-PS/2022** yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat S
NIK : 3275023010640019
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Taman Pulo Gebang, Jl. Gebang Mas 9 Blok B No. 8
Rt. 008/Rw. 013, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap :

Nama : Pemerintah Kabupaten Sleman
Alamat : Jl. Parasmya (Komplek Kantor Bupati), Beran, Tridadi
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2022 dengan register sengketa Nomor: **005/V/KIDDIY-PS/2022**.



Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Sleman. Adapun informasi publik yang diminta oleh Pemohon adalah: Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.

[2.3] Bahwa berdasarkan permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 555.3/0292 tanggal 29 Maret 2022 perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik.

[2.4] Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], permohonan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 29 Maret 2022 Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Sleman.

[2.5] Bahwa berdasarkan keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4], Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 555.3/1169 tanggal 12 Mei 2022 perihal Jawaban Keberatan atas Permohonan Informasi.

[2.6] Bahwa berdasarkan tanggapan Atasan PPID yang tidak memenuhi pokok permintaan informasi dan menyatakan sebagian informasi yang diminta sebagai informasi dikecualikan, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2022 dan diregister dengan Nomor: **005/V/KIDDIY-PS/2022**.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 31 Mei 2022 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon dan Termohon tidak hadir. Agenda pemeriksaan awal dilanjutkan pada tanggal 9 Juni 2022, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dengan alasan menginginkan persidangan secara luring (*offline*). Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022 tidak mencapai

dilaksanakan secara *offline* dan tidak bersedia menghadiri Mediasi secara *online* berdasarkan email tanggal 13 Juni 2022 dengan surat Nomor: 555/01560, kemudian Pemohon menyatakan menarik diri dari Mediasi.

[2.8] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka Sengketa Informasi Publik *a quo* dilanjutkan melalui proses adjudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022, Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam sidang adjudikasi tersebut.

Alasan Permohonan Informasi

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik sebagai bentuk pengawasan masyarakat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena tanggapan Atasan PPID tidak memenuhi pokok permintaan informasi dan menyatakan sebagian informasi yang diminta sebagai informasi dikecualikan.

Petitum

[2.11] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. Menyatakan bahwa obyek gugatan/sengketa adalah informasi publik yang terbuka dan dikuasai Termohon serta bukan informasi yang dikecualikan, sehingga Termohon wajib memberikannya kepada Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan secara lengkap seluruh informasi sebagaimana pokok gugatan/sengketa ini kepada Pemohon.
4. Memerintahkan Termohon untuk menempatkan informasi sebagaimana pokok sengketa ini ke dalam Daftar Informasi Publik di lingkup Badan Publik Termohon.
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2022 Pemohon memberikan keterangan membenarkan kronologi permohonan informasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.5].



Surat-surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Scan KTP atas nama Muhammad Hidayat S
Bukti P-2	Email Permohonan Informasi tanggal 16 Maret 2022
Bukti P-3	Soft copy Surat Jawaban Permohonan Informasi tanggal 29 Maret 2022
Bukti P-4	Email Keberatan tanggal 29 Maret 2022
Bukti P-5	Soft copy Surat Jawaban atas keberatan tanggal 19 Maret 2022

Keterangan Termohon

[2.14] Bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan tanggal 31 Mei 2022, 9 Juni 2022, dan 23 Juni 2022.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] dan [3.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi



[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] sampai [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 4, 11, 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, Nomor NIK: 3275023010640019 atas nama Muhammad Hidayat S beralamat di Taman Pulau Gebang, Jl. Gebang Mas 9 Blok B No.8, RT. 008/RW.013, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.11] dan [3.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui:

1. Surat Undangan Nomor: 180/075 tanggal 25 Mei 2022 perihal Undangan Para Pihak, Sidang Ajudikasi Non Litigasi I – Agenda Pemeriksaan Awal, Selasa, 31 Mei 2022, pukul 09.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom;
2. Surat Undangan Nomor: 180/087 tanggal 6 Juni 2022 perihal Undangan Para Pihak, Sidang Ajudikasi Non Litigasi II – Agenda Pemeriksaan Awal (lanjutan), Kamis, 9 Juni 2022, pukul 13.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom;
3. Surat Undangan Nomor: 180/094 tanggal 10 Juni 2022 perihal Undangan Para Pihak, Mediasi I – Agenda Mediasi, Selasa, 14 Juni 2022, pukul 09.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom; dan
4. Surat Undangan Nomor: 180/100 tanggal 16 Juni 2022 perihal Undangan Para Pihak, Sidang Ajudikasi Non Litigasi III – Agenda Pembuktian, Kamis, 23 Juni 2022, pukul 09.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi *whatsapp* ke petugas kesekretariatan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2022 dan oleh Panitera Pengganti disampaikan kepada Majelis Komisioner yang isinya adalah mengajukan permohonan untuk tidak menghadiri proses persidangan karena alasan adanya hambatan pribadi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti persidangan semua sengketa yang ditangani oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan memohon persidangan dapat tetap dilaksanakan dengan tanpa kehadiran Pemohon atau Pemohon dianggap hadir atau persidangan *in absentia*.



[3.20] Menimbang bahwa Panitera Pengganti telah menghubungi Pemohon untuk melakukan konfirmasi terkait alasan yang jelas ketidakhadiran Pemohon namun Pemohon tidak dapat dihubungi.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, yaitu pada tanggal **31 Mei 2022** dan **23 Juni 2022** sedangkan Panitera telah memanggilnya secara patut.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi: "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur."

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.18] sampai dengan paragraf [3.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, sedangkan Panitera Pengganti telah memanggilnya secara patut, dengan demikian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur.



5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: **005/V/KIDDIY-PS/2022 GUGUR.**

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 29 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.I.P., M.H.** selaku Ketua merangkap Anggota, **H. Moh. Hasyim, S.H., M. Hum.** dan **Agus Purwanta, S.K.M.,** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 29 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TERTANDA

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

TERTANDA

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis

TERTANDA

Agus Purwanta, S.K.M.

Panitera Pengganti

TERTANDA

Dimas Prakoso, S.H.



Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 29 Juni 2022

Panitera Pengganti,

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)